



BAB III

PEMBENTUKAN KOTA BAWAH DI SURABAYA

A. Kota Surabaya Sampai Abad Ke-17

1. Surabaya Pada Masa Majapahit

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang termasyhur di Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 M. Majapahit merupakan kerajaan terakhir yang menganut faham hindu-budha, sebelum berkembangnya kerajaan bercorak Islam di Indonesia.

Berdirinya Majapahit pada tahun 1293 bisa ditafsirkan melalui *Kidung Harsya Wijaya, Demung VI Kidung 84-b dan 85-b*, yang berbunyi:¹

Lah iya ujarira anging mben ikapanjang punang diwasayu ri purneng karttikamasa iku abecik. Tan-dwa prapta pancadaci cukleng kacatur ndan siradhipati enjang mangkyangdani pan byuban ing karya punang wong atrewuh aliweran jalw istri prasama aky' amundut sawidhiwidhana karma ning boma ambbiseka prabbu ri purwa ning pangstryan tang pangastbulan.

Hanya demikianlah katanya, bahwa besuk lusa hari kelima belas bulan kartika itu adalah baik. Tiada lama kemudian telah sampailah pada waktunya, tanggal lima belas waktu purnama ke empat, pada pagi hari sang adhipati telah banyut dalam tugas pekerjaannya, semua orang juga kelihatan sibuk laki-laki perempuan mempersiapkan untaian kalung boreh konyoh untuk dipersembahkan pada awal pelantikan

¹Sartono Kartodirejo, Soekmono, dkk, *700 Tahun Majapahit 1293-1993: Suatu Bunga Rampai*,(1992), xi.



Dari kidung di atas maka dapat ditafsirkan bahwa hari kelahiran Majapahit disesuaikan dengan hari pelantikan raja pertama Majapahit, Raden Wijaya, yang dilaksanakan pada hari *ke-15, bulan kartika, tahun 1215 Çaka*.

Bulan kartika pada kalender Tahun Çaka adalah bulan keempat. Sedangkan menurut perhitungan, tahun Çaka 78 tahun lebih muda dibandingkan tahun Masehi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *hari ke-5, Bulan keempat tahun 1215 Çaka* bertepatan dengan hari ke-12 Bulan ke-11, tahun 1293 Masehi atau tanggal *12 November 1293 Masehi*.

Majapahit banyak melakukan ekspansi hampir di pelosok tanah air. Kekuasaannya mencapai sebagian besar pulau Jawa, Madura, Bali, dan masih banyak lagi wilayah di Indonesia. Kala itu, Surabaya juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan dari kerajaan majapahit. Perkembangan Surabaya mengikuti berkembang ataupun kemunduran dari kerajaan majapahit itu sendiri.

Surabaya merupakan pelabuhan terpenting bagi Majapahit. Ketika tahun 1416 H, sebagaimana diceritakan oleh sumber-sumber cina yang dihimpun oleh W.P. Groeneveldt dalam bukunya “Historical Notes on Indonesia and Malaya” bahwa Surabaya sudah ditempati oleh orang-orang kaya termasuk warga Cina. Kawasan ini terletak di aliran sungai mulai dari Patjekan (Jagir) hingga ke Panggung, kampung Baru, dan ke Timur di Nyamplungan.²

²Nanang purwono, *Melacak Jejak Tembok Kota Soerabaia*, (Surabaya: Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, 2010), 11.



Berdasarkan sumber-sumber sejarah awal tentang Surabaya, berikut akan diuraikan bagaimana kota Surabaya telah ada pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk. Mulai dari sumber *Prasasti Trawulan I (1358 A.D)*, *Nagarakretagama*, dan *Babad Tanah Jawi*.

a. Prasasti Trawulan I (1358 A.D)

Prasasti Trawulan merupakan sebuah prasasti dari zaman Raja Hayam Wuruk (Raja Sanagara). Prasasti tersebut terdiri dari delapan lempengan tembaga, huruf dan bahasanya Jawa kuna. Dalam prasasti tersebut terdapat nama desa-desa penyeberangan di seluruh mandala Jawa. Desa-desa penyeberangan tersebut beberapa di antaranya merupakan desa di jalur-jalur pelayaran dan perdagangan. Terdapat 78 desa penyeberangan tersebut, seperti dalam kutipan Prasasti pada lempengan V, yang memberitakan tentang Surabaya sebagai berikut:

Nusa, Temon, Parajengan, Pakatekan, Wunglu, Rabutri, Banu Mredu, gacor, Tambak, Pujut, Miring Dmak, Klung, Pagedangan, Mabuwur, Godong (?), Rumsan, Cangu, Randu Gowok, Wahas, Nagra, Sabra, Waringin Pitu, Lagada, Pamotan, Tulangan, Panumbangan, Jeruk, Trung, Kambang Cri, Tda, Gasang, Bukul, **Curabhaya**, serta desa-desa di pinggir sungai tempat penyeberangan, yaitu Madanten, Waringin Wok, Bajrapura, Sambo, Jerebeng, Pabulangan, Balawi, Luwayu, Katapang, Pagaran, Kamudi, Parijik, Parung, Paslwurang, Kedal, Bhangkal, Widang, Pakhoban, dan lain sebagainya.³

Namun, *Prasasti Trawulan I (1358 A.D)*, bukan sebuah prasasti tentang pendirian desa menjadi daerah perdika⁴. Melainkan, sebuah prasasti yang dikeluarkan

³Sartono Kartodirejo, Soekmono, dkk, *700 Tahun Majapahit 1293-1993: Suatu Bunga Rampai*, 197.

⁴Orang (daerah) yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah.



oleh Raja Hayam Wuruk sebagai bentuk perintah kepada Panji Marggabhaya Ki Ajaran Rata, yang tinggal di desa Cangu dan Panji Angraksaji Ki Ajaran Ragi yang tinggal di Trung, untuk memegang teguh peraturan penyeberangan dan *keswantantaraan* yang sudah ada. Keterangan tersebut berdasarkan interpretasi dari data sebagai berikut:⁵

- I pingsornyajña paduka Çri maharaja, *kumo nakèn ikanang anambangi sayawadwipamandala. Makadi panji marggabhaya, makasi kasir ajaran rata. Stapita. Mungawi cangu.* Pagawayakna sang hyang ajnahaji pracasti. Rajasanagararalancana. Mungawe salah si kining tamra. Riptopala. Kapagkwa denikang anambangi sayawadwipamandala. Maka.....
- Kuneng tingkahikang anambangi sayawadwipamandala. Makadi *panji marggabhaya. Kyajaran rata. Wang panjiangraksaji. Kyajaran ragi.* Kwalaswantara.....
- Kuneng sangka ri gengnyadhimuktinikang anambangi sayawadwipa mandala makadi panji marggabhaya, mwa (ng) *panjiangraksaji. Kyajaran ragi.* Stapita. Mungawi trung.

Artinya:

- Turunlah titah paduka Çri Maharaja, memerintahkan kepada *orang yang menambahkan penyeberangan di segenap mandala pulau Jawa, terutama Panji Marggabhaya, yang bernama (= keturunan dari) Ajaran Rata, yang bertempat tinggal di Cangu, di atas sebuah lempeng perunggu, ataupun di atas sebuah batu. (piagam itu) harus dipegang teguh oleh (segenap) orang yang menambang penyeberangan di segenap mandala Pulau Jawa, terutama.....*
- Konon kebiasaan orang yang menambang penyeberangan di segenap mandala Pulau Jawa, terutama Panji Marggabhaya Ki

⁵William H. Frederick, Soeri Soeroto (Ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES, 2005), 206-207.



Ajaran Rata dan Panji Angraksaji Ki Ajaran Ragi, *melakukan hak swatantra*.....

- Tetapi karena besar pembaktian mereka yang diseberangkan di sungai segenap mandala Pulau Jawa, terutama Panji Marggabhaya dan *Panji Angraksaji Ki Ajaran Ragi, yang bertempat tinggal di Trung*.....

b. Nagarakretagama

Dalam *Nagarakretagama*, Pupuh XVII/5 diberitakan bahwa nama Surabaya sudah ada pada masa Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Pada saat itu, Surabaya telah menjadi tempat penyeberangan untuk perahu kecil yang akan menuju ke Buwun. Namun, untuk pelayaran yang jauh biasanya melewati Tuban dan Gresik. Berikut merupakan Pupuh XVII/5: “Atau pergilah beliau bersembah bakti ke hadapan Hyang Acalapati. Biasanya terus menuju Blitar, Jimur mengunjungi gunung-gunung permai di Daha terutama ke Polaman, ke Kuwu dan Lingga hingga desa Bangin. Jika sampai di Jenggala, singgah di Surabaya, terus menuju Buwun”.⁶

Dari data tersebut di atas Sdr. Sunarto Timur telah membuat suatu interpretasi bahwa *kunjungan baginda (Rajasanagara) di Surabaya itu pada tahun sebelum 1353 A.D.* berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa *Surabaya telah dikunjungi Hayam Wuruk sebelum Pajang atau sebelum tahun 1353 A.D.* dan berarti Surabaya sudah ada pada masa Majapahit.

c. Babad Tanah Jawi

HJ. De Graaf berhasil menerjemahkan buku *De Regering van Panembahan Senapati Ingalaga*, yang bercerita mengenai sejarah raja-raja Jawa-Mataram. Dengan

⁶Ibid., 282.



bertitik tolak dengan kronik-kronik pribumi, dan dengan menggunakan sumber Belanda, bahkan Portugis ia mencoba mengungkap riwayat kebangkitan Mataram pada masa pemerintahan Senapati.

Dalam buku *Awal Kebangkitan Mataram* dijelaskan mengenai pangeran Surabaya dari *Babad Tanah Jawi*. Diberitakan bahwa setelah terbunuhnya Raja Demak oleh putra “Pate Pondan” yang merupakan pangeran Surabaya, membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan ayahnya, ketiga kakaknya, dan 62 anggota keluarga lainnya, juga ikut dibunuh.

Selanjutnya, delapan pembesar kerajaan di Jepara akhirnya memilih seorang bernama “Pete Sudayo”, pangeran Surabaya yang berada di “Pisammanes”, sebagai kaisar. Dari sana ia dipanggil ke Demak, disambut sangat meriah, dan diangkat sebagai kaisar, yang memerintah seluruh “laoa, Bale” dan Madura. Setelah itu, ia menetap di Demak. Terdapat beberapa asumsi mengenai “Pate Sudayo”. Pertama, bahwa Pate Sudayo merupakan Gusti Sidayu. Namun kiranya tidak masuk akal, apabila Gusti Sidayu itu sekaligus juga menjadi Gusti Surabaya. Dalam Naskah Museum Nasional di Jakarta mempunyai sebuah tulisan tangan (Koleksi Brandes, No. 474), yang memuat daftar para penguasa Surabaya.⁷

Tokoh No. 9 dalam daftar itu, bernama Pangeran Sunjaya, yang mempunyai persamaan bunyi dengan Sudayo. Menurut H.J. De Graaf, bahwa Sunjaya ini segera diganti oleh Pangeran Pekik yang terbunuh pada tahun 1659. Dalam daftar silsilah

⁷H.J. De Graaf, *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1897), 56.



Surabaya itu tercatat bahwa Pangeran Pekik adalah keturunan dari Sunan Ampel. Dengan kata lain, raja-raja abad ke-17 dari Surabaya menganggap dirinya, keturunan Sunan Ampel.

Dalam *Babad Tanah Djawi*, juga menyebutkan bahwa Pangeran Pekik adalah “seorang keturunan pandita”. Pandita yang mana tidak disebutkan, namun yang paling dekat adalah Sunan Ampel. Para keturunan Pangeran Pekik juga sangat memuja Sunan Ampel. Dikisahkan, suatu ketika mereka (keturunan Pangeran Pekik), berjalan beriringan untuk berziarah ke Makam Sunan Ampel, bahkan tidak takut untuk berperang dengan lawan politik mereka agar makam Sunan Ampel dipertahankan. Dalam perkembangannya, Surabaya menjadi daerah yang terkuat di Jawa Timur. Suatu lawan yang pantas untuk Mataram.⁸

2. Surabaya Pada Masa Kesultanan Demak

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan Islam di Jawa bersamaan dengan melemahnya posisi Majapahit. Sehingga, peristiwa itu memberi angin segar bagi penguasa-penguasa Islam untuk mendirikan sebuah kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, wali songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Islam pertama. Raden Patah diberi gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. Ketika itu, Demak masih bernama Bintoro, yang merupakan daerah asal Majapahit yang diberikan raja

⁸Ibid., 57.



Majapahit kepada Raden Patah. Raden Patah berkuasa atas kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16.⁹

Setelah Raden Patah meninggal tampuk kekuasaan Demak dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sambrang Lor, dikenal juga dengan nama Pati Unus. Setelah ia naik tahta, ia merencanakan untuk menakhlukkan Malaka. Semangatnya itu semakin memuncak ketika Malaka berhasil ditakhlukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Namun Pati Unus, harus menelan sakitnya kekalahan besar. Setelah Pati Unus berkuasa ia digantikan oleh Trenggono yang dilantik sebagai sultan oleh Sunan Gunung Jati, yang mendapat gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin, ia memerintah pada tahun 1524 sampai 1546 M. Pada masa inilah Islam berkembang ke seluruh Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Pada tahun 1527 Demak berhasil menakhlukkan Sunda Kelapa dan juga Tuban. Selanjutnya, tahun 1529 berhasil menakhlukkan Madiun, Blora (1530), Surabaya (1531), Pasuruan (1535).¹⁰

Selanjutnya, Kesultanan Demak mengalami Kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antar kerabat kerajaan. Pada tahun 1549, kekuasaan Kesultanan Demak beralih ke kesultanan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir.

Pada masa kesultanan Demak, Surabaya telah mendapat otoritas dalam pengurusan wilayahnya. Digambarkan bahwa Surabaya pada tahun 1525, telah menjadi sebuah kota yang lebih maju, masyarakatnya lebih dinamis sehingga mereka

⁹Purwadi, *The History of Javanese Kings: Sejarah Raja-Raja Jawa*, (Yogyakarta: Ragam Media, 2010), 269.

¹⁰Samsul Munir, Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 336.



merasa mampu untuk mengurus administrasinya sendiri. Bahkan, Surabaya digambarkan sebagai sebuah kota besar seperti halnya Majapahit.

G.H. Von Vaber, menjelaskan bahwa Surabaya sudah mapan dengan administrasinya, yang berupa Kepangeranan atau Kadipaten Surabaya. Pangeran Pekik, sebagaimana disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, merupakan Pangeran pertama di Surabaya yang mengaku keturunan dari Sunan Ampel.

Menurut Prof. Dr. Aminudin Kasdi, dalam bukunya *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa, Relasi Pusat Daerah pada Periode Akhir Mataram 1726-1745*, mendeskripsikan Surabaya pada tahun 1680-1709, sebagai sebuah wilayah yang terletak di tepi sungai besar (Brantas) dan merupakan kota terpenting dan terbesar di Kerajaan Jawa. Sekitar 10.000 kepala keluarga yang telah mendiami wilayah Surabaya. Di Surabaya juga banyak keturunan Cina, jalan-jalan kota Surabaya besar, indah, dan bagus. Surabaya juga memiliki Paseban¹¹ yang luas, masjid yang besar beserta pasarnya juga besar.¹²

Surabaya sebagaimana dijelaskan di atas merupakan sebuah kawasan Kadipaten, jelas tidak heran apabila terdapat nama-nama kampung yang memperkuat bahwa di kawasan ini pernah tinggal para punggawa kraton seperti Kampung Carikan (carik), Kampung Tumenggung (Tumenggung), Maspati (Patih), Kepatihan (Kepatian), Kampung Praban (Prabu), dan Kampung Kranggan (Ronggo).

¹¹Balai yang digunakan untuk menghadap raja dsb.; balai penghadapan yang besar.

¹²Aiminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Mataram (1726-1746)*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 251.



Sementara itu, terdapat beberapa bukti bahwa di kawasan ini pernah berdiri tembok kraton dapat dianalisa dari nama kampung yang memiliki arti fisik terhadap tembok kraton. Misalnya, kampung Bubutan (Butotan atau Pintu Gerbang) di sebelah barat kraton, Lawang Seketeng (pintu) di sebelah timur, dan Baliwerti (benteng penguat) sebelah selatan.

3. Surabaya Pada Masa Kesultanan Mataram

Seiring dengan runtuhnya kesultana Demak (1478-1546) dan berdirinya Kesultanan Pajang (1548-1582), serta diikuti dengan bangkitnya Kesultanan Mataram (1575-1755), Surabaya menjadi sasaran utama penakhlukan Mataram.

Awal dari Kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijaya (Pajang), yang meminta bantuan Ki Pamanahan yang berasal dari daerah pedalaman untuk menghadapi pemberontakan dari Aria Panangsang. Sebagai balasannya, Ki Pamanahan mendapat sebidang tanah di daerah Mataram. Disanalah keturunan dari Ki Pamanahan mendirikan Kesultanan Mataram.¹³

Kesultanan mataram didirikan oleh Sutawijaya. Pada masa keemasannya, kesultanan Mataram berhasil menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk wilayah Madura. Pada tahun 1601-1613 tampuk pemerintah kesultanan Mataram berada dalam kekuasaan Prabu Hanyokrowati atau Panembahan Seda Ing Krapyak.

¹³Asy'ari, Akhwan Mukarrom dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL PRESS, 2004), 276.



Pada masa pemerintahan Krapyak, lawan yang paling kuat adalah Surabaya. Pada tahun 1610 Krapyak mulai menyerang Surabaya secara langsung. Sampai tahun 1613, serangan-serangan Mataram setiap tahun menghancurkan panen padi Surabaya sehingga memperlemah dasar-dasar ekonominya.

Ketika Panembahan Krapyak meninggal tahun 1613, kepemimpinannya digantikan oleh putranya, Sultan Agung (1613-1646), yang merupakan raja terbesar di Mataram. Pada tahun 1614, Sultan Agung menyerang Surabaya bagian selatan yakni Ujung Timur, Malang dan kemungkinan juga Pasuruan. Tentara Surabaya tampaknya berusaha menyerang tentara Mataram di dalam perjalanannya kembali, tetapi dapat dikalahkan oleh tentara Mataram. Pada tahun 1615, Sultan Agung menduduki Wirasaba (di dekat kota Maja Agung sekarang) yang strategis, karena Wirasaba menguasai pintu gerbang ke muara Sungai Brantas, hal itu menjadi beban psikologis karena Wirasaba pernah menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Sultan Agung berhasil dengan kemenangan-kemengannya. Secara periodeik, dari tahun 1620 sampai tahun 1625 Sultan Agung mengepung Surabaya dan membinasakan hasil-hasil panennya. Sehingga, sungai Brantas dibendung dan jatah air untuk kota diputus. Pada tahun 1622, Tuban yang merupakan sekutu dari Surabaya, diseberang laut Jawa, Sukadana berhasil ditakhlukkan yang mengakibatkan terputusnya salah satu sumber suplei ke kota Surabaya. Selanjutnya, pada tahun 1624 setelah melakukan serangan besar-besaran, tentara Sultan Agung berhasil menaklukkan Madura yang mengakibatkan Surabaya terputus dari sumber suplei penting yang lain. Akhirnya, pada tahun 1625 Surabaya sendiri berhasil



ditakhlukkan, bukan karena diserang melainkan karena kelaparan. Penguasanya, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan nama Jayalengkara, diizinkan untuk tetap tinggal di Surabaya sebagai vassal agung, sedangkan putranya Pangeran Pekik, diperintahkan untuk menempuh kehidupan sebagai petapa di makam Sunan Ampel.¹⁴

Pada tahun 1619, seluruh Jawa Timur sudah berada di bawah kekuasaannya. Pada masa itu pula, kontak-kontak bersenjata antara Kesultana Mataram dengan VOC mulai terjadi. Namun, ketika Sultan Agung Wafat dan digantikan oleh Amangkurat I, Kesultanan Mataram tidak reda akan konflik, dengan lawan dibantu oleh para ulama dan santri, yang merasa prihatin terhadap agamanya. Pemberontakan-pemberontakan seperti itulah, yang mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Mataram.¹⁵ Meskipun ekspansi yang dilakukan Kesultanan Mataram mengakibatkan hancurnya kota-kota pesisir dan mengakibatkan perdagangan setengahnya menjadi lumpuh, namun posisi Kesultanan Mataram dalam jaringan perdagangan di Indonesia masih berpengaruh.

B. Kebijakan Pembangunan Kota Bawah

Pada awal abad ke-16, di bawah pimpinan Francisco Serrao Portugis berhasil mendarat di Hitu (Ambon utara). Di Hitu Portugis berhasil mengambil hati penguasa setempat, sehingga terdapat perseteruan antar penguasa Ternate dan Tidore untuk mendapat bantuan dari Portugis. Dengan demikian, portugis disambut baik di daerah tersebut karena mereka juga dapat membawa bahan pangan dan membeli rempah-

¹⁴Ibid., 65-67.

¹⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 215.



rempah. Akan tetapi, perdagangan Asia segera bangkit kembali, sehingga Portugis tidak dapat melakukan monopoli dalam perdagangan rempah-rempah. Persekutuan Portugis dengan Ternate mengakibatkan pembangunan benteng disana. Sementara itu, hubungan Portugis dengan penguasa yang beragama Islam berubah menjadi tegang karena Portugis berusaha melakukan kristenisasi. Dalam perkembangannya, Portugis terusir dari Tidore dan menetap di Ambon. Ternate menjadi sebuah Negara berkembang yang menganut Islam dan anti Portugis. Setelah bangsa Portugis pergi, barulah orang-orang Belanda datang ke Indonesia.¹⁶

Ekspedisi Belanda yang pertama ke Hindia Timur di pimpin oleh Cornelis de Houtman. Membawa 40 kapal dengan 249 awak kapal dan 64 meriam, ia berangkat dan pada bulan Juni 1596 kapal de Houtman tiba di Banten dan melakukan perjalanan ke pantai utara Pulau Jawa serta berhasil membawa pulang rempah-rempah.¹⁷ Sehingga, pada tahun berikutnya, berdatangan pula kapal-kapal Belanda yang bersaing memperebutkan rempah-rempah di Indonesia. Dengan diperolehnya banyak keuntungan dari sebagian besar pelayaran pada tahun 1598, maka pada tahun 1601 empat belas buah ekspedisi yang berbeda berangkat melakukan pelayaran dari negeri Belanda. Persaingan yang ketat antar Belanda di Indonesia mengakibatkan parlemen

¹⁶M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), 35-36.

¹⁷Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Imporium Sampai Imperium*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 70.



Belanda menetapkan fusi perseroan dagang yang saling bersaing dalam satu wadah yakni VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie).¹⁸

Pada tahun 1602, kedatangan VOC bertujuan untuk mengembangkan usaha perdagangannya, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa dan melakukan monopoli perdagangan. VOC mendapatkan kekuasaan untuk melakukan perdagangan, pelayaran, dan hak untuk melakukan kegiatan –kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Dalam tubuh VOC, masing-masing diwakili oleh sistem majelis (*kamer*) untuk enam wilayah di Belanda. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur yang telah disetujui, yang seluruhnya berjumlah tujuh belas orang dan disebut sebagai *Heeren XVII* (Tuan-tuan tujuh belas). Namun, dalam perkembangannya urusan-urusan VOC di Asia akhirnya ditangani oleh gubernur jenderal. Untuk mencegah kemungkinan gubernur jenderal yang bersifat despotis, maka dibentuklah Dewan Hindia (*Raad van Indie*). Berdasarkan sebuah *oktroi* yang diberikan oleh parlemen, maka VOC mempunyai wewenang untuk mendaftarkan personel atas dasar sumpah setia, melakukan peperangan, membangun benteng-benteng, dan mengadakan perjanjian-perjanjian keseluruhan Asia.¹⁹

Sebagai sebuah organisasi perdagangan, VOC membatasi kegiatannya di Hindia Timur hanya dalam perdagangan murni. Mereka bersemboyan membeli barang dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga mahal. Akan

¹⁸Ibid., 38.

¹⁹Ibid., 39.



tetapi, terjadi ketidakpuasan VOC dalam bertransaksi dengan pihak individu maupun produsen langsung. Sehingga VOC harus melakukan transaksi dengan pihak raja, penguasa, ataupun pemimpin setempat. Dalam hal ini, VOC tidak menggunakan cara kekerasan dalam penakhlukan penguasa setempat. Namun, strategi yang dilakukan adalah “membantu”, atau melakukan intervensi serta menerapkan politik memecah belah (*divide et impera*) para penguasa pribumi yang lemah, namun mempunyai legitimasi yang kuat untuk memperoleh tahta dari lawan-lawannya.²⁰

Pada tahun 1617, VOC telah sampai di Surabaya, dibuktikan dengan berdirinya kantor dagang dan sebuah Loji (*loge*). Sultan Agung, sejak kedatangan VOC, melihat bahwa mereka adalah ancaman. Tidak heran, apabila terjadi beberapa kali kontak senjata, yang mengakibatkan VOC sempat tutup. Akan tetapi, setelah kekuasaan Mataram beralih ke Amangkurat I, kesempatan VOC untuk masuk dalam wilayah Surabaya terbuka kembali.²¹

Program pokok pemerintahan Amangkurat I adalah usaha mengkonsolidasikan Kerajaan Mataram, mensentralisasikan administrasi dan keuangan, serta menumpas semua perlawanan. Dia ingin mengubah kerajaan Mataram dari kekuatan militer dan kemampuan untuk memenangkan atau memaksa suatu keputusan menjadi suatu kerajaan yang bersatu, sumber-sumber pendapatannya dimonopoli untuk kepentingan raja. Sehingga, hal tersebut

²⁰Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Mataram (1726-1746)*, 276.

²¹Nanang, *Melacak Jejak Tembok Surabaya*, 23.

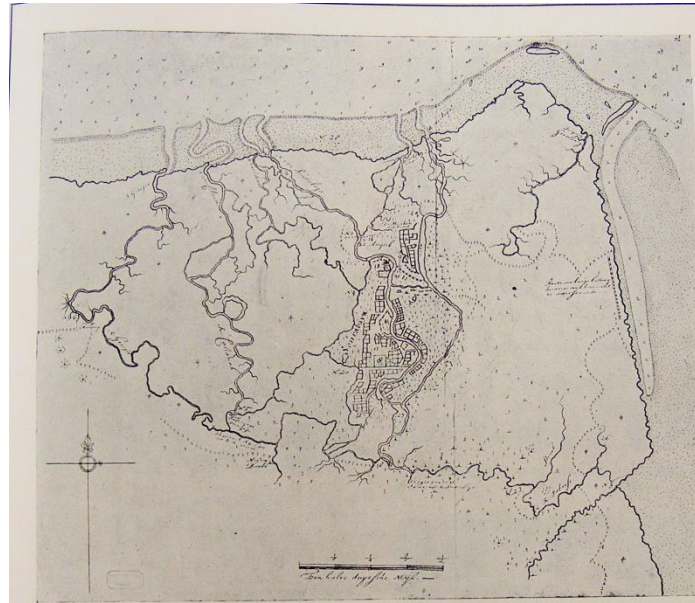


menimbulkan banyak kontroversi dikalangan petinggi kerajaan dan rakyat serta melahirkan para pemberontak.²²

Amangkurat I meminta bantuan kepada VOC untuk memerangi para pemberontak, khususnya Trunojoyo yang merupakan seorang bangsawan Madura. Atas perlawanan itu, Trunojoyo berhasil menguasai wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan Mataram, seperti Madura Barat (1674) dan Surabaya, kawasan yang kini bernama Kampung Kraton (1675). Di kawasan inilah, yang saat itu menjadi pusat administrasi lokal, didirikan sebuah benteng pertahanan oleh Trunojoyo. Trunojoyo mendapat bantuan dari rakyat Madura, rakyat Makasar di bawah pimpinan Hasanuddin yang telah kalah dengan VOC, juga rakyat Surabaya sendiri. Bahkan putra dari Amangkurat I, yakni Adipati Anom, juga tidak suka dengan kepemimpinan ayahnya. Namun, karena khawatir apabila Trunojoyo berhasil menggulingkan tahta ayahnya, dia tidak dapat menggantikan kekuasaan atas wilayah Mataram, sehingga Adipati Anom, berbalik mendukung ayahnya. Dengan kekuatan penuh Trunojoyo berhasil melumpuhkan ibu kota Mataram.²³

²²M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 104.

²³Nanang Purwono, *Melacak Jejak Tembok Kota Surabaya*, 24.



Gambar 1.2 Peta Pertahanan Wilayah Trunojoyo Tahun 1678

Pada tahun 1677, Amangkurat I dan VOC memperbaharui perjanjian tahun 1646. Pihak Belanda berjanji akan membantu raja melawan musuh-musuhnya, tetapi raja harus membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk bantuan-bantuan terhadap raja dan memberikan konsesi ekonomi kepada VOC, misalnya pembebasan dari cukai. Pemberian izin bagi VOC untuk mendirikan tempat tinggal dan pos-pos militer di pesisir dan di pedalaman. Dan perjanjian tanggal 19 Oktober 1677, berisi tentang penggadaian seluruh pelabuhan di pantai utara Jawa dan perluasan wilayah Batavia dari sungai Karawang sampai Sungai Pamanukan.²⁴ Akan tetapi, pada tahun tersebut pula Amangkurat I wafat .

Sepeninggal Amangkurat I, Adipati Anom secara langsung menduduki tahta ayahnya, dengan gelar Amangkurat II. Pada masa kepemimpinannya, ia melakukan

²⁴Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Akhir Mataram (1726-1746)*, 167.



perjanjian kembali dengan VOC. Ia menjanjikan akan memungut pajak dari pelabuhan-pelabuhan daerah pesisir sampai hutang ayahnya lunas, monopoli pembelian beras dan gula, monopoli atas impor tekstil dan candu, pembebasan dari cukai, diserahkannya Semarang sebagai wilayah Belanda dan diakuinya perbatasan-perbatasan Batavia yang sekarang telah membentang ke selatan sampai Samudera Hindia, sehingga seluruh dataran tinggi Priangan menjadi wilayah VOC. Perjanjian perlawanan juga telah ditanda tangani oleh Amangkurat II dan VOC tentang persekutuan melawan Trunojoyo.²⁵

Pada tahun 1677 di bawah pimpinan Cornelis Speelman, VOC berhasil menguasai Surabaya. Benteng Trunojoyo sedikit demi sedikit dapat dikuasai VOC. Akhirnya, Trunojoyo terdesak keluar Surabaya dan dapat ditangkap di lereng gunung Kelud oleh Kapitan Jonker pada tanggal 27 Desember 1679. Kemudian Trunojoyo diserahkan kepada Amangkurat II dan dihukum mati.²⁶

Kondisi semakin buruk ketika Amangkurat II tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada VOC. Setelah Amangkurat meninggal (w. 1703) ia digantikan oleh anaknya yang bergelar Amangkurat III. Mataram terpecah menjadi dua, pertama adalah kelompok putra mahkota (Amangkurat III) dan kedua adalah kelompok pendukung Pangeran Puger (Pakubuwana I). perselisihan-perselisihan itu mengakibatkan Pakubuwana I lari ke Semarang dan bekerjasama dengan VOC (ketika itu sudah menjadi musuh Amangkurat III). Selanjutnya, Amangkurat III kalah

²⁵M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 116.

²⁶Nanang Purwono, *Melacak Jejak Tembok Kota Surabaya*, 25-26.



dalam Perang Suksesi Jawa I, sehingga ia harus lari untuk bergabung dengan Surapati. Namun, pada tahun 1708, akhirnya Amangkurat III menyerahkan diri kepada VOC.

Pada bulan oktober 1705 Pakubuwana dan VOC mencapai suatu perjanjian baru. Pihak Belanda menghapuskan hutang-hutang wangsa yang terkumpul sebelum tahun 1705 sebagai imbalan atas diberikannya konsesi yang besar oleh Pakubuwono kepada VOC. Konsesi ini meliputi pengakuan ulang atas batas wilayah Batavia, termasuk Periang. Pengakuan bahwa Cirebon merupakan daerah perwalian VOC. Diserhkannya separoh Madura bagian timur. Ditegaskannya kekuasaan VOC atas Semarang. Diberikan hak membangun benteng-benteng di manapun di Jawa, dan konsesi lainnya mengenai monopoli dagang di Jawa.²⁷

Selanjutnya, secara *de facto* Surabaya berada di bawah kekuasaan Belanda. Maka sejak saat itu, pembangunan kota Surabaya secara fisik dimulai dari Belanda, oleh Cornelis Speelman.

Perbentengan kota Surabaya merupakan suatu yang sangat penting dalam perkembangan kota dari masa ke masa. Perbentengan kota Surabaya sudah terjadi pada masa pemerintahan Kediri dengan rajanya Jayakatwang, daerah Patjekan yang dalam peta kota Surabaya modern sudah tidak ada, namun masih bisa dibuktikan dengan peta kota tahun 1900-an dijadikan benteng pertahanan. Sehingga dapat dijelaskan faktor-faktor perbentengan kota menjadi penting di Surabaya.

²⁷M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 131.



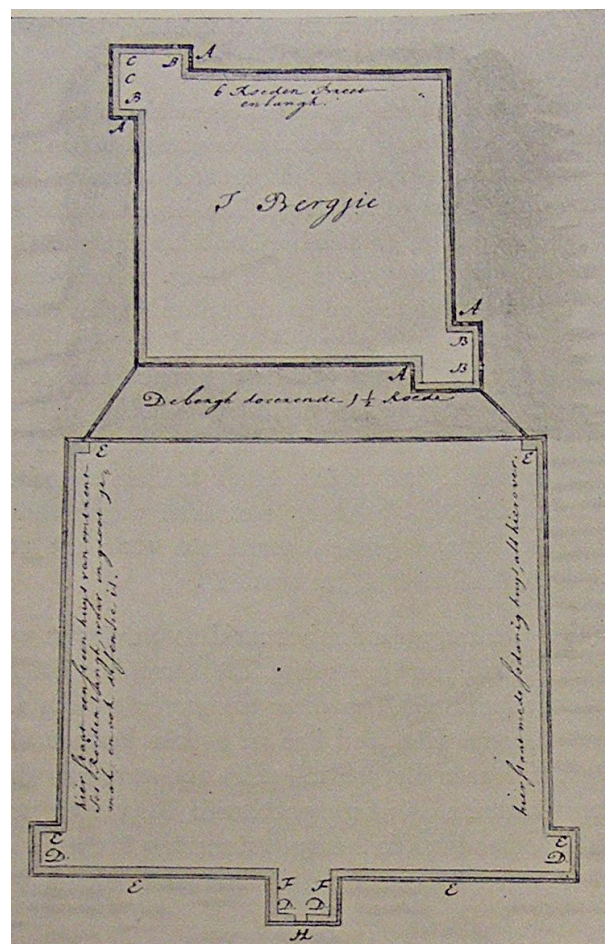
Benteng Belvedere atau *Providentia* merupakan bangunan pertama yang didirikan oleh Cornelis Speelman pada tahun 1678. Ketika itu, ia baru saja mengalahkan Trunojono, bangsawan Madura yang anti penjajah. Pembangunan benteng ini bertujuan untukantisipasi terhadap berbagai kemungkinan bahaya yang bisa mengancam mereka. Letak benteng ini berada di sebelah barat sungai Kalimas (kini di lokasi itu berdiri Jembatan Merah Plaza I).

Benteng ini bertembok tebal, berbentuk simetris dan pada setiap sudutnya terdapat bastion lengkap dengan persenjataan meriam-meriam. Sementara di dalam benteng dibangun, Kantor Bea Cukai dan galangan kapal.

Sementara menurut Von Faber dalam *Oud Soerabaia* bahwa benteng ini merupakan benteng pertama yang dibangun selain dilengkapi dengan sistem persenjataan, juga sudah terdapat perkantoran untuk mendukung misi dagang VOC di Surabaya. Peta berikut merupakan peta tertua dari perbentengan pertama orang Belanda di Surabaya yang kompleks bersama pagarnya sering disebut *Huis op den Berg*. Peta ini ditemukan di Atlas Amsterdam Kompeni Hindia Timur pada abad XVII dibuat menurut skala 8 *roed*. Benteng ini dibangun 1678. Dari keterangan gambar yang ada bahwa meriam yang ada pada peta benteng ini terdiri dari 22 buah: 10 dari logam dan 12 besi. Pembagian ini ditunjukkan dengan huruf yang ada di sini: A. empat meriam logam yang tidak berpeluru 1 pon, B. empat meriam logam dengan peluru masing-masing 1 pon, C. Dua meriam logam dengan peluru masing-masing 3 pon, D. Empat meriam besi dengan peluru masing-masing 6 pon, E. Enam meriam



besi dengan peluru 4 pon, F. dua meriam besi dengan peluru 3 pon. (Huruf G tidak muncul pada peta), H. Gerbang.



Gambar 1.3 Benteng Pertama (Benteng Belvedere). (*Oud Soerabaia* Von Faber).

Pembangunan benteng dilanjutkan ke selatan yang juga dilengkapi dengan tembok kota sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan. Pembangunan inilah yang kelak disebut sebagai kota Belanda Surabaya.

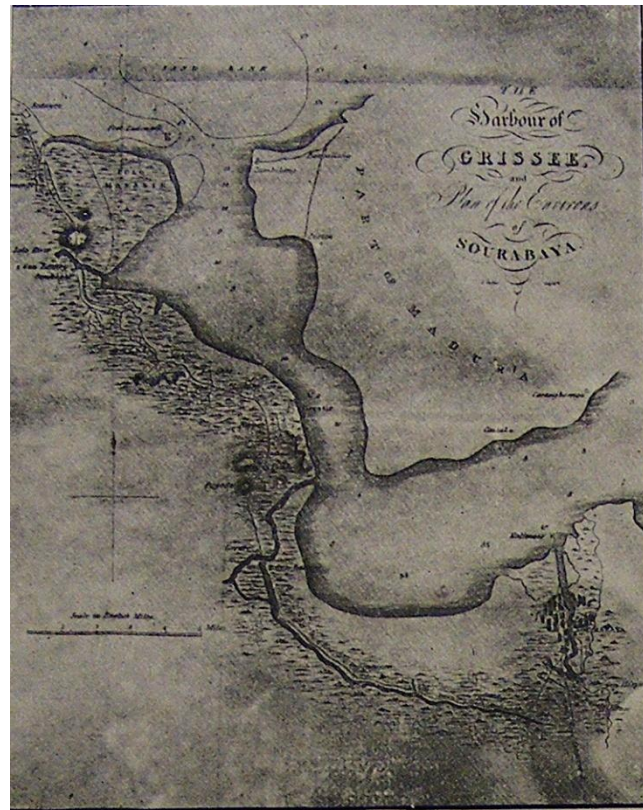


Luas dan batas tembok kota ini, jika dilihat berdasarkan peta Surabaya lama tahun 1866, meliputi: sepanjang jalan sebelah timur Monumen Pertempuran Surabaya di kompleks Jembatan Merah Plaza hingga jalan Jembatan Merah (batas tembok timur); jalan Cendrawasi dan jalan Merak (batas tembok selatan); jalan Krembangan Timur, kemudian memotong jalan Rajawali dan lurus ke utara berada di jalan Garuda dan bertemu dengan ujung utara jalan di sebelah timur di sekitar Monumen Pertempuran Surabaya.²⁸

Selanjutnya, Belanda membangun Tembok Kota I untuk melengkapi kebutuhan Belanda akan perumahan, perkantoran serta pertahanan. Tembok kota ini berada di sebelah selatan Benteng Belvedere dan inilah yang lantas disebut dengan Kota Belanda. Disebut Kota Belanda karena semua sarana dan prasarana yang ada dibangun demi kepentingan Belanda sendiri. Karena bersifat eksklusif, mereka pun terpisah dengan komunitas yang ada sebelumnya yakni komunitas Arab, dan Cina serta pribumi yang bermukim disebelah timur sungai Kalimas. Sementara Kota Belanda atau Komunitas Eropa berada di sebelah barat sungai.²⁹

²⁸ Nanang Purwono, *Melacak Jejak Tembok Kota Surabaya*, 26.

²⁹ *Ibid.*, 65.



Gambar 1.4 Peta Surabaya dan Gresik (*Oud Soerabaia* Von Faber)

Peta ini menunjukkan letak Benteng Kalimas (Fort Kalimas) di Surabaya dan Benteng Lodewijk (Fort Lodewijk) di wilayah Gresik. Dengan Benteng Kalimas di sisi timur selat Madura dan Benteng Lodewijk di sisi barat selat Madura menjadikan Surabaya tempat yang cukup terlindungi.

Pada tahun 1808 sampai 1811, Surabaya dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 bernama Gubernur Jenderal HW. Deandels. Bagi Deandels, Surabaya memegang peranan penting dalam pertahanan wilayah Hindia Belanda. Sehingga, ia membangun Benteng Kalimas atau *Fort* Kalimas dengan fungsi sebagai tempat memantau dan melindungi kota Surabaya dari ancaman serta bahaya yang



datang dari arah selat Madura sebelah timur. Masa pemerintahan Deandels adalah masa di mana pembangunan sistem pertahanan kota semakin dikembangkan. Sekarang situs ini berada dalam area basis militer Armatim, tepatnya di sekitar berdirinya monument Jalesveva Jayamahe yang menjadi ikon basis militer angkatan laut Indonesia wilayah timur. Deandles juga melakukan perombakan tembok kota I dan Benteng Belvedere dengan menggantinya Benteng pertahanan Lodewijk, yang berfungsi untukantisipasi serangan yang datang dari arah barat selat Madura. Benteng ini dulu berada di sebuah pulau yang bernama Pulau Menari, yang kini dikenal dengan pulau Mengare, termasuk dalam wilayah Kecamatan Bungah, Gresik. Serta membangun barak militer di Jotangan (sekarang kompleks Polrestabes Surabaya), tepat di sebelah selatan batas pagar tembok kota I. Di bawah pimpinan Deandels, Surabaya semakin meluas hingga selatan kota tepatnya di kawasan Simpang. Akan tetapi, kepemimpinan Deandels di Surabaya hanya bertahan selama tiga tahun. Karena perlakuannya yang keras terhadap raja-raja Jawa juga adanya kerja rodi yang dilakukannya terhadap pribumi, maka Deandels ditarik mundur dari jabatannya.³⁰

Pada masa Deandels wilayah Keresidenan Surabaya di sebelah barat merupakan batas barat wilayah Lamongan, sebelah timur (selat Madura), utara adalah

³⁰Ibid., 72.



Laut Jawa. Sebelum tahun 1875 Pulau Madura masuk *Afdeeling Surabaya*, sebelah selatan adalah batas di selatan Surabaya (Kali Porong).³¹

Pembangunan benteng ini atas kebijakan Gubernur Jendral Van Den Bosch (1830-1833) untuk menerapkan rencana pertahanan umum di Jawa setelah terjadinya Perang Diponegoro selama lima tahun mulai dari 1825-1830. Wilayah kota ini jauh lebih luas dibandingkan dengan tembok kota I. dari sebelah utara, tembok kota ini dulunya berdiri menyusuri sepanjang jalan Sisingamangaraja hingga jalan Indrapura sisi utara. Di bagian barat letak tembok berada pada jalan Indrapura hingga bertemu I jalan Kebon Rojo. Sementara dari Kebon Rojo hingga jalan Stasiun Kota dan berbatasan dengan sungai Pegirian adalah batas tembok kota sebelah selatan. Selanjutnya, Kali Pegirian menjadi pembatas kota sebelah timur dan bertemu dengan pembatas kota sebelah utara yang berupa Benteng Prins Hendrik.³²

Benteng Prins Hendrik atau biasa disebut *Citadel Prins Hendrik*, merupakan benteng yang dulunya terletak di sebelah timur Jembatan *Petekan* di kampung yang sekarang bernama Benteng Miring³³. Benteng ini dibangun pada tahun 1838 dan selesai pada tahun 1845. Benteng ini dibongkar pada tahun 1895.

Dalam perkembangannya, bentuk benteng pertahanan kota semakin modern, yang dibangun dalam kompleks pangkalan angkatan laut, *Marine Establishment* (ME). Pembangunan secara fisik dimulai pada tahun 1846 oleh Gubernur Jenderal J.J.

³¹Rintoko, dkk, *Seri Sejarah: Studi Dokumentasi Perkembangan Teritorial Surabaya 1850-1960*, (Jakarta: Unesa University Press, 2010), 53-54.

³²Nanang Purwono, *Melacak Jejak Tembok Kota Surabaya*, 73.

³³Diberi nama Benteng Miring karena benteng Prins Hendrik ini dibangun dilahan yang mengalami kemiringan. Keberadaan benteng ini menyisakan sebuah nama yakni Benteng Mirik yang dipakai untuk nama kampung.



Rochussen (1845-1851) setelah melalui beberapa kali pengajuan pembangunannya.³⁴ Seiring dengan perubahan zaman, tata kota dari kota bertembok Surabaya tidak banyak mengalami perubahan meski struktur bangunan yang ada di dalamnya kini banyak mengalami perubahan. Di antara perubahan sejumlah wajah struktur bangunan, masih ada yang tersisa, yakni keberadaan kompleks pemukiman dan perkantoran, seperti kompleks pemukiman masyarakat Arab dan Melayu, Pecinan dan Eropa dalam Kota Bawah.

Penembokan kota Surabaya sebagaimana telah dijelaskan, dalam perkembangannya membedakan wilayah kota secara keseluruhan. Wilayah kota yang berada di tembok kota disebut sebagai Kota Bawah (*Benedenstad*) atau kawasan yang sering disebut Soerabaia Lama (*Oud Soerabaia*). Di era pemerintahan Belanda wilayah kota Surabaya disebut sebagai kota Belanda. Sangat beralasan karena disinilah segala aktivitas dan dinamika masyarakat kulit putih dan warga pribumi, yang bekerja untuk kepentingan Belanda berpusat.

Kota bawah ini dibatasi oleh tembok kota yang melingkar dari utara, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Petekan (*Ophaal Brug*), melebar ke barat selatan (*Pesapen*), terus ke selatan (*Kremlangan*), ke timur (*Bibis dan Cantian*), ke utara (*Srenggahan-Tenggomong-Nyamplungan*) dan kembali ke selatan jembatan Petekan, jalan Jakarta (*Batavia Weg*), sebelah timur sungai Kalimas. Secara geografis Kota Bawah dipisahkan oleh Kalimas. Di sebelah barat sungai merupakan wilayah pemukiman orang Eropa. Sementara di sisi timur sungai terdapat perkampungan Arab

³⁴Ibid., 89.



(*Arabische Kamp*) dan perkampungan Cina (*Chinesse Kamp*). Selain itu, mengalir Sungai Pegirian di sisi timur Kota Bawah.³⁵

Menurut Handinoto dalam “Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa Kolonial”, secara historis, kota-kota pedalaman di Jawa Timur dulunya hanya pusat pemerintahan, namun mengalami perubahan setelah ditingkatkannya kontrol atas tanah dan tenaga kerja melalui sistem *cultuurstelsel* (1830-1870). Perubahan ini karena terjadi perubahan fungsi kota dan berakibat langsung kepada bentuk dan struktur kotanya. Produksi perkebunan kolonial (terutama gula, kopi dan tembakau) memperoleh bentuk baru sebagai sentra produksi, distribusi dan perdagangan yang diatur dalam sistem perkotaan. Dari sini, setiap kota memberikan sumbangannya sendiri di dalam produksi ekspor kolonial. Sentra perdagangan Eropa bertugas untuk mengatur produksi ekspor ke pasaran dunia berkembang menjadi pusat-pusat kerja yang khas, yang dipimpin oleh orang-orang Eropa. Dari periode inilah adanya sebutan *Benedenstad* untuk sentra bisnis, dan *Bovenstad* sebagai rumah tinggal orang Eropa. Kawasan Kota Bawah adalah daerah sekitar Jembatan Merah, sedangkan Kota Atas meliputi Gubeng, Darmo dan Ketabang.³⁶

Pada tahun 1880 tembok kota ini mulai dibongkar. Namun, sebelum dibongkar pembangunannya sempat terhenti karena konstruksinya dianggap kurang sesuai dengan perkembangan teknologi militer kala itu. Dapat dilihat dari karya arsitektur bangunan-bangunan yang ada hingga sekarang, bahwa banyak tersebar

³⁵Nanang Purwono, *Mana Soerabaia Koe*, (Surabaya: INTI Grafika, 2006), 26.

³⁶Handinoto, *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa Pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 475.



gedung-gedung yang didominasi oleh gaya arsitektur neo-klasik (1880-1910). Sementara gaya klasiknya antara abad ke-18 sampai abad ke-19, sebagian sudah mengalami renovasi.³⁷

Secara geografis, warga keturunan Arab ini mendiami wilayah padat di Kota Bawah, yaitu di sebelah timur sungai Kalimas atau di sebelah utara jalan Kembang Jepun. Sebagai kawasan Islam, di tempat ini berdiri masjid yang bernama Masjid Ampel serta makam Sunan Ampel. Kini situs dan komunitas Ampel merupakan monumen penting penyebaran agama Islam di Jawa.

Dukut Imam Widodo dalam “Soerabaia Tempo Doeloe” menjelaskan bahwa masyarakat Tionghoa menjadi golongan yang cukup penting di Surabaya. Mereka sudah ada sejak tahun 1411 yang pada awalnya mereka mendiami suatu daerah di timur Kalimas yang disebut Kampung Pecinan (Chinese Camps). Perkampungan Tionghoa ini antara lain *jalan Slompretan*³⁸, *Tapekongstraat*, *Tjaipostraat*, *Bongkaran*, *Chinesche voorstraat*, *Bibis straat* dan *Pasar Bong*.

Secara geografis, letak perkampungan kulit putih dalam tata kota Surabaya lama terletak di sisi barat sungai kalimas. Perkampungan Eropa mempunyai ciri fisik sedikit berbeda dengan perkampungan Arab dan Cina. Selain banyak terdapat bangunan perkantoran baik swasta maupun pemerintah yang mewah, jalan-jalannyapun jauh lebih tertata dan tertip. Kawasan perumahan di daerah Pesapen memiliki halaman yang lapang. Di daerah ini juga terdapat kompleks militer, yang di

³⁷Nanang Purwono, *Mana Soerabaia Koe*, 25.

³⁸*Slompretan* adalah jalan suatu kawasan sibuk di daerah Pecinan dan menjadi kawasan bisnis kota Surabaya.



era Gubernur Jenderal Deandles merupakan bengkel senjata dan perlengkapan militer.

Perkembangan kota semakin pesat, dan sudah tidak memungkinkan lagi terus berkembang di wilayah dalam kota. Maka perluasan wilayah Surabaya di awal abad ke-20 bergerak ke selatan dan meliputi daerah Simpang, Ketabang, Gubeng, Darmo dan Sawahan. Wilayah yang berada di luar tembok itu disebut Kota Atas (Bovenstad). Perkembangan kota yang terjadi ini seiring dengan dibentuknya pemerintah Gumeente Soerabaia pada 1 April 1906. Maka untuk memberikan fasilitas kepada para pegawai pemerintah dengan mendirikan perumahan, sekolahan, rumah sakit, gereja serta fasilitas umum lainnya.

Kota Atas merupakan kawasan yang lebih modern dan elit jika dibandingkan dengan Kota Bawah. Tata kota dan lingkungan pemukiman lebih lapang, indah dan layak bagi petinggi kota. Seperti gedung Grahadi, yang dibangun oleh Dick Van Hogendorps pada tahun 1775 serta gedung Setan di Kupang yang dibangun pada tahun 1809 dan merupakan rumah tuan tanah di Jawa Timur yang bernama J.A. Ridder van Middlekoop. Nama-nama jalan Surabaya pada umumnya adalah memakai nama petinggi pemerintah Hindia Belanda dan keluarga kerajaan Belanda. Misalnya, jalan Dr. Soetomo dulunya bernama Coen Boulevard (kependekan dari nama Gubernur Jenderal Jan Pietersen Coen), jalan Kombespol M. Duriat yang dulunya bernama Juliana Boulevard (nama Ratu Belanda) dan jalan Tidar yang dulunya



bernama Prins Hendriks. Jalan-jalan kota yang bernama Boulevard seperti Darmo Boulevard, Goebeng Boeleward dan Ketabang Boulevard.³⁹

C. Struktur Sosial Masyarakat Kota Bawah

Penbentengan kota Surabaya sebagaimana telah dijelaskan, dalam perkembangannya membedakan wilayah kota secara keseluruhan. Wilayah kota yang berada di tembok kota disebut sebagai Kota Bawah (Benedenstad) atau kawasan yang sering disebut Soerabaia Lama (Oud Soerabaia).

Kota bawah ini dibatasi oleh tembok kota yang melingkar dari utara, tepatnya di sebelah selatan Jembatan Petekan (*Ophaal Brug*), melebar ke barat selatan (Pesapen), terus ke selatan (Krempangan), ke timur (Bibis dan Cantian), ke utara (Srenggahan-Tenggomong-Nyamplungan) dan kembali ke selatan jembatan Petekan, jalan Jakarta (*Batavia Weg*), sebelah timur sungai Kalimas.⁴⁰

Pada tahun 1870, para ahli perkotaan menganggap bahwa tahun itu merupakan titik awal perkembangan kota-kota di Indonesia. Kota-kota dikembangkan menjadi kota modern dengan segala fasilitas yang lengkap. Periode ini ditandai dengan penetapan Undang-undang Agraria 1870 yang menjadi simbol liberalisme ekonomi di Indonesia. Secara umum kota-kota yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 lebih bercirikan atau berfungsi sebagai kota Belanda. Ciri-ciri

³⁹Nanang, *Melacak Jejak Tembok Kota Surabaya*, 41.

⁴⁰Nanang Purwono, *Mana Soerabaia Koe*, (Surabaya: INTI Grafika, 2006), 26.



dari kota Belanda atau Kolonial adalah nuansa pribumi dan nuansa asing. Oposisi antara pribumi dengan asing berakar pada karakter masyarakat kolonial yang bersifat menindas.

Di samping terdapat pribumi dan asing dalam kota Belanda terdapat juga unsur ketimuran yang sangat besar. Oleh karena itu, kota-kota Indonesia pada masa kolonial berkarakteristik sebagai kota *tripartit* karena melibatkan tiga unsur yang terkait, yakni unsur pribumi yang terdiri dari kampung-kampung, unsur Timur asing (Cina dan Arab) dengan rumah-rumah tokonya, dan unsur Barat dengan benteng dan rumah kolonialnya. Akan tetapi, konfigurasi yang terbentuk seolah bukanlah konfigurasi sosial dan ekonomi yang seimbang, karena konfigurasi tersebut cenderung membentuk stratifikasi, dengan orang-orang Eropa berada di pusat kekuasaan dan orang-orang pribumi berada pada posisi paling dasar. Sementara, orang-orang Cina dan orang-orang Arab berada di posisi tengah-tengah.⁴¹

L. Marcussen dalam “*Third World Housing in Social and Spatial Development*” menggambarkan kota kolonial sebagai suatu sistem sosial, tempat posisi ekonomi dan hubungan politis secara sosial sesuai ras, dan yang menemukan ekspresi spasialnya pada sistem wilayah tinggal yang terpisah. Sistem terpisah ini meliputi wilayah tinggal pribumi, dan perkampungannya, wilayah Cina dan Arab, wilayah tinggal orang Barat yang terdiri dari benteng dan perumahan kolonial.

⁴¹Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), 5.



Kondisi ini menurutnya terjadi di Surabaya yang menerima campur tangan pemerintah Belanda berdasarkan etnisitas.⁴²

Kebijakan penempatan tempat tinggal tersebut berdasarkan *Exorbitante rechten* yang merupakan hak bagi gubernur jenderal untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda. Pada masa kolonial, ketika penguasa adalah mutlak, demi alasan politis praktis hak-hak tersebut dimiliki oleh gubernur jenderal. Alasannya adalah karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku dan antar golongan etnis, sehingga untuk menghindari konflik antar mereka perlu ditunjuk tempat tinggal tertentu. Misalnya, orang Cina di Pecinan atau orang Melayu di Kampung Melayu, dan Orang Arab di Ampel. Dengan hak istimewa ini, maka Hindia Belanda khususnya di kota-kota besar tercipta sistem pemukiman berdasarkan etnis. Sistem ini baru dihapus pada awal abad ke-20.⁴³

Hubungan harmonis antara etnis Timur Asing dengan masyarakat pribumi juga menjadi pemicu adanya kebijakan pemerintah menempatkan mereka sesuai dengan rasnya. Dalam bidang perdagangan, juga menjadi pengaruh ditetapkannya kebijakan tersebut, karena Belanda khawatir apabila orang Timur Asing menguasai perdagangan di Surabaya. Alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran Eropa

⁴²Ibid., 8.

⁴³Ibid., 35.



terhadap semua etnis di Surabaya akan bersatu menentang semua kebijakan pemerintah Eropa.

Hak-hak *Exorbitante*, pada akhirnya mempengaruhi tata kota di Surabaya. Hal yang dilakukan pemerintah kolonial berkaitan dengan penataan kawasan pemukiman adalah pemisahan wilayah pemukiman berdasarkan ras atau etnis. Ini merupakan imbas dari kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda dalam *Regerings Reglement 1854* tentang pelapisan sosial.⁴⁴

Pertama, pemukiman masyarakat Belanda dan Eropa yang terletak di sekitar Jembatan Merah dan Simpang. Kompleks pemukiman ini dilengkapi dengan fasilitas seperti jalan beraspal, penerangan, air bersih, kendaraan, trem listrik, kantor pos, rumah took, barak militer, gereja, kantor Karesidenan Surabaya dan lain-lain. Dalam *Eropa Kamp* berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan ekonomi kota. Kedua, pemukiman orang-orang timur Asing yang terletak di Timur kawasan Jembatan Merah (seberang sungai Kalimas). Orang-orang Cina menempati kawasan Kembang Jepun, Kapasan, Pasar Atom. Sedangkan, orang-orang Arab tinggal di kawasan pemukiman sekitar Masjid Ampel. Di kawasan sebelah Timur Jembatan Merah juga tinggal orang-orang Melayu (*Malaise Kamp*). Ketiga, penduduk asli (pribumi) tinggal di antara tanah-tanah yang tersisa atau di balik gedung-gedung milik orang Eropa. Perkampungan pribumi ini bertolak belakang dengan kondisi

⁴⁴Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1900-1946)*, (Semarang: Mesiass, 2004), 70.



masyarakat Belanda dan Eropa, sehingga terkadang menjadi pemicu permasalahan kota seperti masalah sanitasi, keindahan kota, penyakit dan sebagainya.⁴⁵

Heterogenitas yang terjadi di Surabaya tidak hanya meliputi keragaman etnis tetapi juga mencakup keberagaman status, baik sosial maupun ekonomi. Kaum Priyayi atau elite pribumi di kota Surabaya dan mereka adalah kelas menengah kota, masyarakat Eropa, Arab, Cina juga merupakan penghuni Kota Surabaya dengan status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Sebagian masyarakat Eropa bekerja di kantor-kantor pemerintahan Belanda, sebagian lainnya adalah pengusaha di bidang perkebunan serta perdagangan. Sedangkan masyarakat Tionghoa dan Arab sebagian besar adalah para wiraswasta dengan beragam bidang usaha, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja di kantor pemerintahan. Masyarakat pribumi sebagian besar merupakan masyarakat kelas bawah, baik secara sosial maupun ekonomi.

Pada tahun 1870, pemerintah Belanda memberlakukan Undang-undang Agraria yang mengemukakan bahwa setiap tanah yang tidak terbukti sebagai hak dan milik seseorang dinyatakan sebagai hak milik Negara. Namun, pemerintah Belanda tidak bisa menguasai tanah-tanah partikelir⁴⁶ yang mulai ada, jauh sebelum diterapkannya Undang-Undang Agraria.⁴⁷

⁴⁵Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial Sampai Kemerdekaan*, 10.

⁴⁶Kompleks tanah pertanian maupun tanah rumah, yang diserahkan oleh kompeni, pemerintah sisipan Inggris dan Hindia Belanda kepada pihak swasta dengan hak-hak khusus, yang berupa hadiah, penjualan dan cara-cara lain yang membuat orang swasta memperoleh hak-hak milik penuh.

⁴⁷*Ibid.*, 32.



Pada masa Deandles dan Raffles berkuasa, untuk membangun kota Surabaya terpaksa mereka menjual sebagian tanah di kota ini kepada orang-orang kaya Eropa dan kepada orang-orang Cina. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membangun fasilitas yang mendukung aktifitas mereka di kota ini antara lain benteng Lodewijk, asrama tentara, rumah sakit tentara Simpang, dan fasilitas lainnya. Dari Undang-Undang Agraria terdapat satu masalah penting yang dinamakan *vervreemdingsverbond*, yaitu larangan untuk membeli hak milik pribumi oleh orang asing. aturan tersebut tertuang dalam Staatsblad No. 179 Tahun 1875, yang berbunyi “bahwa pemindahan hak (*vervreemding*) atas tanah orang Indonesia asli (pribumi) kepada orang-orang bukan non pribumi dinyatakan tidak sah alias ilegal”Aturan ini dimaksudkan agar masyarakat pribumi tidak terusir dari tanahnya akibat ulah pihak swasta yang mengincar tanahnya sekaligus untuk mencegah kenaikan harga tanah oleh para pembeli tanah golongan Eropa dan Cina.⁴⁸

⁴⁸Ibid.,33.